

Bentuk Sistem Politik di Desa Beringin

Leonita Kolang¹, Romi Mesra²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
 Email: ¹20606043@gmail.com ²romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 02, 2025

Accepted July 31, 2025

Published July 31, 2025

Kata Kunci:

Sistem Politik Desa,
 Demokrasi Lokal,
 Partisipasi Masyarakat,
 Elit Lokal,
 Pemerintahan Desa



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dinamika sistem politik di Desa Beringin dengan mempertimbangkan struktur formal kelembagaan, dimensi informal kekuasaan, partisipasi masyarakat, dan tantangan dalam implementasi demokrasi lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap informan kunci yang terdiri dari tokoh masyarakat, kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan warga masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa Desa Beringin telah mengadopsi sistem politik demokratis dengan struktur formal yang jelas, partisipasi masyarakat yang cukup baik, dan perkembangan pemerintahan yang positif. Namun, masih terdapat tantangan berupa konsentrasi kekuasaan di tangan elit lokal, keterbatasan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, serta praktik politik identitas dan politik uang yang menghambat konsolidasi demokrasi substantif di tingkat desa.

Abstract

This study aims to analyze the form and dynamics of the political system in Beringin Village by considering the formal institutional structure, informal dimensions of power, community participation, and challenges in the implementation of local democracy. The study uses a qualitative approach with data collection techniques through observation and in-depth interviews with key informants consisting of community leaders, village heads, village officials, members of the Village Consultative Body, and community members. The findings indicate that Beringin Village has adopted a democratic political system with a clear formal structure, fairly good community participation, and positive governance development. However, challenges remain in the form of the concentration of power in the hands of local elites, limitations in the supervisory function of the Village Consultative Body, and the practices of identity politics and money politics that hamper the consolidation of substantive democracy at the village level.

Keywords: Village Political System, Local Democracy, Community Participation, Local Elites, Village Government

A. Pendahuluan

Sistem politik di tingkat desa merupakan manifestasi dari struktur kekuasaan yang terbentuk melalui interaksi kompleks antara aktor-aktor politik lokal, institusi pemerintahan, dan dinamika sosial budaya masyarakat setempat. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia memiliki karakteristik unik dalam penyelenggaraan sistem politiknya yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah, regulasi negara, dan transformasi politik nasional (Maschab, 2013). Dalam perkembangannya, sistem politik desa mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat mulai dari era kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi yang membawa semangat desentralisasi dan demokrasi lokal (Syamsuddin Haris, 2005). Kompleksitas sistem politik desa tidak hanya terletak pada aspek formal kelembagaan, tetapi juga pada dimensi informal yang melibatkan jaringan kekuasaan,

patronase, dan relasi sosial yang mengakar dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Studi tentang politik pemerintahan desa di Indonesia menunjukkan bahwa konfigurasi kekuasaan di level desa sangat dipengaruhi oleh relasi antara kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan elit-elit lokal yang memiliki basis sumber daya ekonomi, sosial, maupun kultural (Cahyono, 2016). Fenomena dinasti politik, oligarki lokal, dan konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir elit desa menjadi realitas yang kerap ditemukan dalam praktik politik pedesaan Indonesia (Dona, 2022). Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dapat diimplementasikan dalam konteks pemerintahan desa yang masih diwarnai oleh struktur sosial hierarkis dan pola kepemimpinan yang cenderung feodal.

Desentralisasi dan otonomi daerah yang digulirkan sejak era reformasi membawa implikasi signifikan terhadap sistem politik desa dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan (Dwipayana dan Eko, 2003). Namun demikian, pemberian otonomi ini tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, melainkan justru dalam beberapa kasus memunculkan bentuk-bentuk baru dari dominasi elit, politik identitas, dan konflik kepentingan yang dapat menghambat proses demokratisasi di tingkat akar rumput (Gaffar, 2004). Oleh karena itu, memahami bentuk dan dinamika sistem politik di desa menjadi sangat penting untuk menganalisis bagaimana kekuasaan didistribusikan, dipertahankan, dan diperebutkan dalam arena politik lokal yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

Penelitian tentang sistem politik desa di Indonesia telah banyak dilakukan dengan berbagai perspektif dan fokus kajian. Sobandi (2008) dalam studinya tentang kompleksitas budaya politik akar rumput di Desa Sunyalangu, Kabupaten Banyumas, mengungkapkan bahwa praktik politik di tingkat desa tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya lokal yang membentuk pola-pola perilaku politik masyarakat, termasuk dalam hal partisipasi pemilihan, orientasi politik, dan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya politik paternalistik masih sangat kuat mempengaruhi dinamika politik desa, di mana figur kepala desa dan elit lokal memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk preferensi politik warga. Temuan ini mengindikasikan bahwa transisi menuju demokrasi lokal di pedesaan menghadapi tantangan struktural yang berakar pada sistem nilai dan norma sosial yang telah lama terbentuk dalam masyarakat.

Sementara itu, Cahyono (2016) mengkaji konflik elite politik di pedesaan dengan fokus pada relasi antara Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa, yang menunjukkan adanya ketegangan struktural dalam sistem politik desa akibat dualisme kekuasaan dan perbedaan kepentingan antara lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat desa. Konflik ini tidak hanya berdimensi personal tetapi juga institusional yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan desa dan proses pengambilan keputusan yang partisipatif. Di sisi lain, Haboddin dan Afala (2022) meneliti formasi basis kekuasaan elit lokal dalam politik lokal dengan menekankan pentingnya memahami bagaimana elit-elit baru muncul dan elit lama bertahan melalui akumulasi sumber daya yang mencakup modal ekonomi, sosial, politik, dan kultural. Studi ini memberikan perspektif bahwa perubahan politik demokratis tidak secara otomatis mengubah struktur kekuasaan di level lokal, tetapi justru menciptakan kondisi di mana elit-elit dengan akses terhadap berbagai sumber daya dapat mempertahankan dan memperkuat posisi mereka dalam konstelasi politik desa.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji sistem politik desa di Indonesia, sebagian besar studi tersebut cenderung bersifat umum dan belum secara spesifik menganalisis bentuk sistem politik di konteks desa tertentu dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang unik. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada aspek konflik elite, budaya politik, dan relasi kekuasaan secara makro, namun kurang mengeksplorasi bagaimana

sistem politik tersebut termanifestasi dalam praktik-praktik konkret di tingkat mikro pada suatu desa spesifik. Kesenjangan ini menjadi penting karena setiap desa memiliki konteks lokal yang berbeda yang dapat mempengaruhi bentuk dan dinamika sistem politiknya, termasuk faktor geografis, komposisi demografis, struktur ekonomi, dan sejarah politik lokal yang membentuk pola-pola unik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan politik.

Selain itu, studi-studi terdahulu juga belum banyak yang mengintegrasikan analisis mengenai bagaimana perubahan regulasi tentang pemerintahan desa, khususnya pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mempengaruhi transformasi sistem politik di tingkat desa secara konkret dalam kasus-kasus spesifik. Padahal, regulasi ini membawa perubahan fundamental dalam hal kewenangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan mekanisme pengambilan keputusan yang seharusnya memberikan ruang lebih besar bagi demokratisasi dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, masih terdapat kebutuhan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan kontekstual tentang bagaimana sistem politik di desa tertentu terbentuk, berfungsi, dan berkembang dalam merespons dinamika politik lokal dan nasional, serta bagaimana aktor-aktor politik lokal berinteraksi dalam kerangka institusional yang ada.

Kebaruan dari penelitian tentang bentuk sistem politik di Desa Beringin terletak pada pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam menganalisis konfigurasi kekuasaan politik di tingkat desa dengan mempertimbangkan keunikan karakteristik lokal yang membedakannya dari desa-desa lain. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi struktur formal sistem politik desa, tetapi juga mengeksplorasi dimensi informal seperti jaringan patronase, mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan aktor-aktor non-formal, dan interaksi antara institusi tradisional dengan institusi pemerintahan modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas sistem politik di tingkat akar rumput yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan institusional formal.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menawarkan analisis tentang bagaimana implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi desa secara konkret mempengaruhi distribusi kekuasaan, partisipasi politik masyarakat, dan kualitas tata kelola pemerintahan di Desa Beringin. Dengan menggunakan perspektif multi-dimensi yang mengintegrasikan aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya, penelitian ini berupaya memberikan gambaran holistik tentang sistem politik desa yang dapat menjadi rujukan bagi pemahaman praktik politik lokal di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peran aktor-aktor politik lokal, termasuk kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, elit informal, dan masyarakat dalam membentuk dinamika politik dan proses pengambilan keputusan di desa, sehingga dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang bagi penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa.

Realitas sistem politik di Desa Beringin mencerminkan kondisi umum yang terjadi di banyak desa di Indonesia, di mana terdapat tegangan antara struktur formal kelembagaan pemerintahan desa dengan praktik-praktik politik informal yang didasarkan pada relasi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Kepala desa sebagai figur sentral dalam sistem politik desa memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya desa, yang dalam banyak kasus dapat mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan minimnya checks and balances yang efektif. Badan Permusyawaratan Desa yang secara normatif berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas di tingkat desa, dalam praktiknya seringkali tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal karena berbagai faktor seperti keterbatasan kapasitas, ketergantungan terhadap kepala desa, dan dominasi elit-elit tertentu yang memiliki pengaruh kuat di desa.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan di desa

masih terbatas pada mekanisme formal seperti Musyawarah Desa yang sering kali tidak benar-benar partisipatif dan cenderung didominasi oleh elit-elit desa. Masyarakat sebagian besar masih bersikap pasif dan lebih banyak menjadi objek daripada subjek dalam proses politik, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi partisipatif belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan politik desa. Fenomena politik uang, mobilisasi berdasarkan ikatan primordial seperti kekerabatan dan kedekatan sosial, serta masih kuatnya pola patronase dalam hubungan politik di desa juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan sistem politik desa yang demokratis dan akuntabel. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi sistem politik desa memerlukan tidak hanya perubahan regulasi dan kelembagaan, tetapi juga perubahan paradigma dan budaya politik yang lebih fundamental di kalangan aktor-aktor politik lokal dan masyarakat desa secara keseluruhan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupaya untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari fenomena sistem politik di Desa Beringin secara mendalam dan komprehensif. Penelitian kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk menggali informasi yang kaya dan detail mengenai persepsi, pengalaman, dan dinamika sosial politik yang terjadi di tingkat lokal (Creswell, 2016). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas sistem politik desa tidak hanya dari struktur formal kelembagaan, tetapi juga dari dimensi informal seperti relasi kekuasaan, jaringan sosial, dan praktik-praktik politik yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Metode penelitian kualitatif dalam kajian ini dianggap paling tepat karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menganalisis fenomena politik desa dengan mempertimbangkan konteks lokal, nuansa budaya, dan interpretasi subjektif dari para aktor yang terlibat dalam sistem politik tersebut (Sugiyono, 2013).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara mendalam sebagai instrumen utama untuk memperoleh data primer yang akurat dan relevan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung dinamika sistem politik di Desa Beringin, termasuk struktur pemerintahan, proses pengambilan keputusan, mekanisme pemilihan kepala desa, dan interaksi antara berbagai aktor politik lokal (Moleong, 2007). Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data tentang perilaku politik, pola komunikasi, dan praktik-praktik politik yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara atau dokumentasi. Teknik observasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena politik desa dalam konteks alaminya dan mengidentifikasi gap antara aturan formal dengan praktik nyata yang berlangsung di lapangan. Selain itu, observasi juga berguna untuk melakukan triangulasi data guna meningkatkan validitas temuan penelitian.

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang terdiri dari tokoh masyarakat, kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan warga masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait sistem politik di Desa Beringin. Teknik wawancara dipilih karena kemampuannya untuk menggali informasi yang mendalam tentang perspektif, pengalaman, dan pemahaman informan mengenai sistem politik desa (Creswell, 2015). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi isu-isu yang muncul selama proses wawancara dan menggali informasi yang lebih detail. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema utama, dan temuan-temuan penting terkait bentuk dan dinamika sistem politik di Desa Beringin. Kombinasi antara observasi dan wawancara memberikan data yang komprehensif dan saling melengkapi untuk menjawab pertanyaan penelitian secara holistik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Struktur dan Mekanisme Pemerintahan Desa

Hasil observasi menunjukkan bahwa struktur pemerintahan di Desa Beringin mengikuti format kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai dua pilar utama penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang mencakup sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala dusun yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Struktur organisasi pemerintahan desa ini secara formal telah terdokumentasi dengan baik dan terpampang di kantor desa, menunjukkan adanya kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab di antara perangkat desa. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala dalam implementasi struktur organisasi ini, terutama terkait dengan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antar bagian yang belum optimal.

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Beringin berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas yang memiliki kewenangan untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dalam pengamatan yang dilakukan, terlihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah menjalankan fungsinya secara rutin melalui rapat-rapat koordinasi dan musyawarah desa, meskipun intensitas dan efektivitas pengawasan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan. Hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara umum berjalan dengan baik dan cenderung kooperatif, meskipun sesekali terjadi perbedaan pendapat dalam pembahasan kebijakan tertentu yang diselesaikan melalui mekanisme musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa *check and balances* dalam sistem politik desa sudah mulai berjalan, meskipun masih memerlukan penguatan kapasitas dan independensi Badan Permusyawaratan Desa.

Proses pemilihan kepala desa di Desa Beringin dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan langsung oleh masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan observasi terhadap dokumentasi pemilihan kepala desa sebelumnya dan informasi dari berbagai pihak, proses pemilihan berlangsung dengan relatif tertib dan transparan, mulai dari tahap pendaftaran calon, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa tergolong tinggi, yang menunjukkan adanya kesadaran politik dan kepedulian masyarakat terhadap proses pemilihan pemimpin desa mereka. Namun demikian, dalam proses kampanye masih ditemukan praktik-praktik yang kurang sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat, seperti politik uang dalam skala kecil dan mobilisasi pemilih berdasarkan kedekatan keluarga atau kelompok tertentu, yang mengindikasikan bahwa budaya politik transaksional masih cukup kuat mempengaruhi perilaku pemilih di tingkat desa.

b. Partisipasi dan Persepsi Masyarakat terhadap Sistem Politik Desa

Wawancara dengan Ibu SK menjelaskan bahwa,

“...menurut saya sistem politik yang ada di desa beringin ini sudah tergolong cukup bagus bila dilihat cukup bagus karena masyarakatnya mendukung dan ikut serta mengembangkan nilai politik di desa beringin”.

Gambar 1. Wawancara dengan Ibu SK



Sumber: Data Primer

Pandangan ini mencerminkan adanya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dan mekanisme politik yang ada, serta mengindikasikan bahwa masyarakat merasa memiliki ruang untuk terlibat dalam proses-proses politik di tingkat desa. Partisipasi masyarakat yang dimaksud tidak hanya terbatas pada keterlibatan dalam pemilihan kepala desa, tetapi juga dalam forum-forum musyawarah desa, gotong royong, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan politik desa. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial dalam bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap urusan bersama masih cukup kuat di Desa Beringin, yang menjadi aset penting bagi penguatan sistem politik demokratis di tingkat lokal.

Ibu MW dalam wawancaranya menegaskan bahwa,

“...Menurut informasi yang saya dapat bahwa desa beringin menggunakan sistem politik yang demokrasi dimana demokrasi berarti dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Gambar 2. Wawancara dengan Ibu MW



Sumber: Data Primer

Penerapan sistem demokrasi di tingkat desa dimanifestasikan dalam berbagai aspek, mulai dari pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung, pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat, hingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat memandang bahwa kepala desa dan perangkat desa yang ada saat ini telah berupaya untuk menjalankan pemerintahan dengan prinsip-prinsip demokratis, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan terutama dalam hal transparansi informasi dan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat.

Bapak MT memberikan perspektif tentang hal berikut,

“...Menurut saya sistem politik yang ada didesa beringin dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang cukup pesat dan dapat dilihat dari segi pemerintahannya”.

Gambar 3. Wawancara dengan Bapak MT



Sumber: Data Primer

Perkembangan positif dalam sistem politik desa ini juga didukung oleh implementasi Undang-Undang Desa yang memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar kepada desa, sehingga pemerintah desa memiliki ruang yang lebih luas untuk berinovasi dan mengembangkan potensi desa sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun demikian, kemajuan yang telah dicapai ini perlu terus dikawal dan diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, dan peningkatan kesadaran politik masyarakat agar sistem politik desa dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c. Dinamika Kekuasaan dan Tantangan Sistem Politik Desa

Observasi terhadap dinamika kekuasaan di Desa Beringin menunjukkan bahwa meskipun struktur formal pemerintahan desa telah diatur dengan jelas, dalam praktiknya terdapat dimensi informal yang sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan distribusi kekuasaan. Kepala desa sebagai figur sentral dalam sistem politik desa memiliki pengaruh yang sangat besar tidak hanya karena kewenangan formal yang dimilikinya, tetapi juga karena modal sosial, ekonomi, dan kultural yang dimilikinya dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, keputusan-keputusan penting terkait pembangunan dan kebijakan desa lebih banyak ditentukan oleh kepala desa dan sekelompok kecil elit desa, sementara mekanisme musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum partisipatif cenderung menjadi ajang legitimasi keputusan yang sudah dibuat sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem politik desa secara formal bersifat demokratis, dalam praktiknya masih terdapat konsentrasi kekuasaan di tangan elit tertentu yang dapat menghambat partisipasi substantif masyarakat dalam proses politik.

Tantangan lain yang dihadapi dalam sistem politik Desa Beringin adalah masih terbatasnya kapasitas dan independensi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang seharusnya menjadi representasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, dalam praktiknya seringkali memiliki kedekatan personal atau kepentingan tertentu dengan kepala desa yang dapat mempengaruhi objektivitas pengawasan. Keterbatasan pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa tentang tugas dan fungsinya, serta minimnya akses terhadap informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pengawasan efektif, menjadi

kendala struktural yang menghambat bekerjanya sistem check and balances di tingkat desa. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa agar dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan eksekutif di desa.

Dinamika politik identitas dan fenomena politik uang juga menjadi tantangan serius bagi penguatan sistem politik demokratis di Desa Beringin. Dalam proses pemilihan kepala desa dan dalam berbagai pengambilan keputusan politik, faktor-faktor seperti hubungan kekerabatan, afiliasi kelompok sosial keagamaan, dan kedekatan personal masih menjadi pertimbangan utama masyarakat, yang dapat mengalahkan pertimbangan rasional berdasarkan kompetensi dan integritas calon. Praktik pemberian uang atau barang kepada pemilih menjelang pemilihan, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, telah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat, yang mencerminkan masih kuatnya budaya politik transaksional. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sistem politik desa secara formal telah mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi, transformasi budaya politik dari pola-pola tradisional dan patronase menuju budaya politik yang rasional dan partisipatif masih memerlukan proses yang panjang dan upaya yang sistematis dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan masyarakat itu sendiri.

2. Pembahasan

a. Struktur dan Mekanisme Pemerintahan Desa

Temuan penelitian mengenai struktur dan mekanisme pemerintahan desa menunjukkan bahwa Desa Beringin telah mengadopsi sistem politik demokrasi lokal yang diatur dalam kerangka regulasi pemerintahan desa di Indonesia. Konsep demokrasi lokal menurut Marzali (2004) menekankan pada pentingnya nilai-nilai seperti penghargaan terhadap individu, kebebasan berpendapat, persamaan kedudukan di depan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Desa Beringin, struktur formal pemerintahan yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mencerminkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut melalui pemisahan fungsi eksekutif dan legislatif di tingkat desa. Namun demikian, implementasi struktur formal ini masih menghadapi tantangan terutama terkait dengan kapasitas kelembagaan dan budaya politik yang masih mengakar dalam pola-pola tradisional (Syaukani, 2002).

Relasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem politik desa merupakan manifestasi dari prinsip checks and balances yang menjadi salah satu pilar demokrasi modern. Menurut Sanit (1985), sistem perwakilan politik di Indonesia termasuk di tingkat desa harus mampu menjalankan fungsi representasi dan pengawasan secara efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kasus Desa Beringin, hubungan antara kedua lembaga tersebut menunjukkan pola yang cenderung kooperatif namun belum optimal dalam hal pengawasan, yang mengindikasikan bahwa fungsi kontrol belum berjalan secara maksimal. Hal ini sejalan dengan temuan Cahyono (2016) yang menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, Badan Permusyawaratan Desa mengalami kendala struktural dalam menjalankan fungsi pengawasan akibat ketergantungan terhadap kepala desa dan keterbatasan kapasitas kelembagaan.

Proses pemilihan kepala desa yang berlangsung secara demokratis di Desa Beringin mencerminkan implementasi demokrasi prosedural yang telah menjadi standar dalam sistem politik Indonesia pasca reformasi. Menurut Dwipayana dan Eko (2003), pemilihan kepala desa secara langsung merupakan salah satu indikator demokratisasi di tingkat akar rumput yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin mereka sendiri.

Namun demikian, praktik politik uang dan mobilisasi berdasarkan ikatan primordial yang masih ditemukan dalam proses pemilihan menunjukkan bahwa transisi menuju demokrasi substantif masih menghadapi hambatan kultural. Gaffar (2004) menjelaskan bahwa demokratisasi bukan hanya soal prosedur pemilihan, tetapi juga menyangkut kualitas proses politik yang mencakup kebebasan memilih, kesetaraan akses informasi, dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan, yang kesemuanya masih menjadi tantangan dalam konteks politik desa di Indonesia.

b. Partisipasi dan Persepsi Masyarakat terhadap Sistem Politik Desa

Partisipasi masyarakat dalam sistem politik desa merupakan elemen krusial yang menentukan keberhasilan demokratisasi di tingkat lokal. Menurut Huntington dan Nelson (dalam Budiarjo, 1984), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah, yang dapat dilakukan baik secara individual maupun kolektif, secara terorganisir maupun spontan, dengan cara-cara yang damai atau melalui paksaan. Temuan penelitian di Desa Beringin menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam sistem politik desa sudah cukup baik, terutama dalam konteks pemilihan kepala desa dan keterlibatan dalam musyawarah desa. Hal ini mengindikasikan bahwa modal sosial dalam bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap urusan publik masih cukup kuat di desa tersebut, yang menurut Putnam (1993) merupakan aset penting bagi penguatan demokrasi di tingkat lokal.

Persepsi masyarakat tentang sistem politik demokrasi yang diterapkan di Desa Beringin mencerminkan adanya internalisasi nilai-nilai demokratis dalam kesadaran politik warga desa. Konsep demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dipahami oleh masyarakat sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia. Menurut Suwondo (2000), demokratisasi di pedesaan dalam rangka pelaksanaan otonomi lokal memerlukan tidak hanya perubahan struktur kelembagaan tetapi juga transformasi budaya politik masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip demokrasi merupakan modal penting bagi penguatan sistem politik yang partisipatif dan akuntabel, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara pemahaman normatif dengan implementasi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran demokrasi di tingkat desa memerlukan waktu dan pendampingan yang berkelanjutan.

Perkembangan sistem politik desa yang dinilai mengalami kemajuan dari tahun ke tahun mencerminkan dampak positif dari kebijakan desentralisasi dan otonomi desa yang telah diimplementasikan sejak era reformasi. Menurut Maschab (2013), transformasi politik pemerintahan desa di Indonesia mengalami perubahan signifikan terutama pasca reformasi dengan diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemajuan dalam aspek pemerintahan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Beringin mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas aparatur desa dan perbaikan sistem administrasi pemerintahan. Namun demikian, menurut Haris (2005), desentralisasi dan demokratisasi di tingkat lokal tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik, melainkan memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

c. Dinamika Kekuasaan dan Tantangan Sistem Politik Desa

Dinamika kekuasaan di tingkat desa tidak dapat dilepaskan dari fenomena dominasi elit lokal yang memiliki akses terhadap berbagai sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Teori elit yang dikemukakan oleh Mosca dan Pareto menjelaskan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat kelompok minoritas yang memegang kekuasaan dan mayoritas yang dipimpin (Mosca,

1939; Pareto, 2011). Menurut Mosca, distribusi kekuasaan dalam masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas yang memerintah yang terdiri dari sedikit orang yang menjalankan semua fungsi politik dan memonopoli kekuasaan, serta kelas yang diperintah yang jumlahnya lebih banyak namun memiliki pengaruh terbatas dalam pengambilan keputusan. Temuan penelitian di Desa Beringin menunjukkan adanya konsentrasi kekuasaan di tangan kepala desa dan sekelompok kecil elit desa, yang mengindikasikan bahwa meskipun struktur formal pemerintahan desa telah demokratis, dalam praktiknya masih terdapat oligarki lokal yang dapat menghambat partisipasi substantif masyarakat.

Keterbatasan kapasitas dan independensi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan merupakan tantangan struktural yang menghambat bekerjanya sistem checks and balances di tingkat desa. Menurut Haboddin dan Afala (2022), formasi basis kekuasaan elit lokal dalam politik lokal sangat dipengaruhi oleh kemampuan elit untuk mengakumulasi berbagai modal termasuk modal ekonomi, sosial, politik, dan kultural. Dalam konteks ini, kedekatan personal antara anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa dapat mempengaruhi objektivitas pengawasan dan melemahkan fungsi lembaga legislatif desa sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif. Suhartono dkk (2000) dalam studinya tentang politik lokal menjelaskan bahwa parlemen desa sejak awal kemerdekaan hingga era otonomi daerah mengalami berbagai dinamika yang mencerminkan tegangan antara prinsip demokratisasi dengan realitas politik yang masih diwarnai oleh pola-pola patronase dan dominasi elit.

Fenomena politik identitas dan politik uang yang masih mewarnai praktik politik di Desa Beringin mencerminkan tantangan serius bagi konsolidasi demokrasi di tingkat akar rumput. Menurut Sobandi (2008), kompleksitas budaya politik akar rumput di Indonesia menunjukkan bahwa praktik politik di tingkat desa tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya lokal yang membentuk pola-pola perilaku politik masyarakat, termasuk dalam hal orientasi politik dan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Politik identitas yang didasarkan pada ikatan primordial seperti kekerabatan dan afiliasi kelompok sosial keagamaan dapat mengalahkan pertimbangan rasional dalam proses politik, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya meritokrasi dalam sistem politik desa. Dona (2022) dalam kajiannya tentang dinasti politik di desa menunjukkan bahwa konsentrasi kekuasaan di tangan keluarga atau kelompok tertentu merupakan fenomena yang cukup umum terjadi di tingkat desa, yang mengindikasikan bahwa transformasi menuju demokrasi yang inklusif dan partisipatif masih memerlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengubah struktur dan budaya politik yang telah mengakar dalam masyarakat.

D. Kesimpulan

Sistem politik di Desa Beringin telah mengadopsi struktur formal pemerintahan desa yang demokratis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai dua pilar utama penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam proses politik desa tergolong cukup baik, terutama dalam pemilihan kepala desa dan keterlibatan dalam musyawarah desa, yang mengindikasikan adanya internalisasi nilai-nilai demokratis dalam kesadaran politik warga. Masyarakat menilai bahwa sistem politik desa telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, terutama dalam aspek pemerintahan dan implementasi prinsip-prinsip demokrasi.

Meskipun demikian, implementasi sistem politik demokratis di Desa Beringin masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang perlu mendapat perhatian serius. Konsentrasi kekuasaan di tangan kepala desa dan elit lokal tertentu, keterbatasan kapasitas dan independensi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta

praktik politik identitas dan politik uang yang masih mewarnai dinamika politik desa menjadi hambatan bagi terwujudnya demokrasi substantif di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan akuntabilitas pemerintahan desa, transformasi budaya politik dari pola patronase menuju partisipasi rasional, serta penguatan sistem checks and balances agar sistem politik desa dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

E. Daftar Pustaka

- Budiarjo, M. (1984). *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Gramedia.
- Cahyono, H. (2016). *Konflik Elite Politik di Pedesaan: Relasi Antara Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa*. Jurnal Politik.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dona. (2022). *Dinasti Politik di Desa: Studi tentang Konsentrasi Kekuasaan di Tingkat Lokal*. Jurnal Ilmu Politik.
- Dwipayana, A. A. G. N. A., & Eko, S. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Gaffar, A. (2004). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haboddin, M., & Afala, L. (2022). *Formasi Basis Kekuasaan Elit Lokal dalam Politik Lokal*. Jurnal Administrasi Publik.
- Haris, S. (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1984). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzali, A. (2004). *Demokrasi Lokal di Indonesia*. Antropologi Indonesia, 28(2).
- Maschab, M. (2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mosca, G. (1939). *The Ruling Class*. New York: McGraw-Hill.
- Pareto, V. (2011). *Teori Elit*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Sanit, A. (1985). *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sobandi, B. (2008). *Kompleksitas Budaya Politik Akar Rumput di Desa Sunyalangu, Kabupaten Banyumas*. Sosiohumaniora, 10(3).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, dkk. (2000). *Politik Lokal: Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Suwondo, K. (2000). *Demokratisasi di Pedesaan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Lokal*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Syamsuddin Haris. (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Syaukani. (2002). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.